

Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013 dalam Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045

Imam Machali

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
e-mail: imam.machali@uin-suka.ac.id

DOI: 10.14421/jpi.2014.31.71-94

Diterima: 19 Februari 2014

Direvisi: 20 Maret 2014

Disetujui: 30 April 2014

Abstract

This article is intended to express the basis of policy changes in curriculum 2013, the elements of changes, and the implications of changes in the 2013 curriculum learning system. The results show that the policy of the 2013 curriculum change is based on internal and external challenges that are faced by some Indonesian people in order to prepare for their future generation that are much more productive, creative, innovative and affective. Curriculum policy in 2013 is intended to fulfill some existing shortcomings that are in the previous curriculum. Curriculum 2013 is compiled to develop and to strengthen attitudes, knowledge, and skills in a balanced way. The change of policy in 2013 regarding the four elements of curriculum changes are on Competency Standards (SKL), Content Standard (SI), Standard Process, and Assessment Standards. Furthermore, the learning system of curriculum policy changes in 2013 makes the impact on four issues, they are the learning models of thematic-integrated, scientific approach, active strategies, and authentic assessment.

Keywords: Curriculum 2013, Thematic, Scientific, Authentic

Abstrak

Artikel ini dimaksudkan untuk mengungkap dasar kebijakan perubahan kurikulum 2013, elemen-elemen perubahan, dan implikasi perubahan kurikulum 2013 dalam sistem pembelajaran. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan perubahan kurikulum 2013 didasarkan pada tantangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam rangka menyiapkan generasi yang produktif,

kreatif, inovatif dan afektif. Kebijakan kurikulum 2013 dimaksudkan untuk menyempurnakan berbagai kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Perubahan kebijakan 2013 menyangkut empat elemen perubahan kurikulum yaitu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi (SI), Standar Proses, dan Standar Penilaian. Sistem pembelajaran perubahan kebijakan kurikulum 2013 berdampak pada empat hal, yaitu model pembelajaran berupa tematik-integratif, pendekatan saintifik, strategi aktif, dan penilaian autentik.

Kata Kunci: *Kurikulum 2013, Tematik, Saintifik, Otentik*

Pendahuluan

Sejak Indonesia merdeka, pendidikan telah mengalami berbagai perubahan dan perbaikan kebijakan kurikulum. Dalam sejarah kurikulum di Indonesia paling tidak telah mengalami sebelas kali dinamika perubahan. Dimulai dari masa prakemerdekaan dengan bentuk yang sangat sederhana, dan masa kemerdekaan yang terus menerus disempurnakan yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan tahun 2013. Berbagai kebijakan perubahan kurikulum tersebut didasarkan pada hasil analisis, evaluasi, prediksi dan berbagai tantangan yang dihadapi baik internal maupun eksternal yang terus berubah. Dalam konteks ini kurikulum sebagai produk kebijakan bersifat dinamis, kontekstual, dan relatif. Dinamis sebab terus berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman serta terbuka terhadap kritik. Kontekstual karena sangat dibutuhkan dan didasarkan pada konteks zamannya, dan relatif sebab kebijakan kurikulum yang dihasilkan dipandang bagus atau sempurna pada zamannya, dan akan menjadi tidak relevan pada zaman-zaman berikutnya. Oleh karenanya prinsip dasar dalam kebijakan kurikulum adalah *change and continuity* yaitu perubahan yang dilakukan secara terus menerus.

Kebijakan perubahan Kurikulum 2013 merupakan sebuah *ikhtiar* dan wujud dari prinsip dasar kurikulum *change and continuity* tersebut, yaitu hasil dari kajian, evaluasi, kritik, respon, prediksi, dan berbagai tantangan yang dihadapi. Kurikulum 2013 diyakini sebagai kebijakan strategis dalam menyiapkan dan menghadapi tantangan dan tuntutan masyarakat Indonesia masa depan. Kebijakan kurikulum 2013 akan mampu memerankan fungsi penyesuaian (*the adjusted or adaptive function*), yaitu kurikulum yang mampu mengarahkan peserta didiknya mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial yang terus berubah. Kurikulum 2013 mengintegrasikan tiga ranah kompetensi yaitu sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dalam implementasinya

terangkum dalam Kompetensi Inti 1 (KI-1) berupa sikap spiritual, Kompetensi Inti 2 (KI-2) berupasikap sosial, Kompetensi Inti 3 (KI-3) berupa pengetahuan, dan Kompetensi Inti 4 (KI-4) berupa ketrampilan.

Artikel ini ini berusaha mengungkap dasar kebijakan perubahan kurikulum 2013, elemen-elemen perubahan, dan implikasi perubahan kurikulum 2013 dalam sistem pembelajaran yang meliputi model pembelajaran, pendekatan, strategi, dan penilaian yang digunakan. Lebih lanjut artikel ini mengungkapkan kebijakan perubahan kurikulum 2013 dalam rangka menyiapkan generasi yang produktif, kreatif, inovatif dan afektif pada 100 tahun Indonesia merdeka yaitu tahun 2045 yang sering disebut dengan tahun “Indonesia Emas”.

Kurikulum

Kurikulum (*curriculum*) berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* yang berarti berlari dan *currere* yang artinya tempat berpacu.¹ Dalam bahasa Latin “curriculum” semula berarti *a running course, or race course, especially a chariot race course* dan terdapat pula dalam bahasa Prancis “*courier*” artinya “*to run, berlari*”. Kemudian istilah itu digunakan untuk sejumlah “*courses*” atau matapelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar atau ijazah.² Dalam bahasa Arab, kurikulum diartikan dengan *manhaj*, yakni jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada bidang kehidupan dan kemudian diterapkan dalam bidang pendidikan.³ UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 menjelaskan kurikulum sebagai sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.

Istilah kurikulum mempunyai pengertian yang cukup beragam mulai dari pengertian yang sempit hingga yang sangat luas. Pengertian kurikulum secara sempit seperti yang dikemukakan oleh William B. Ragan yang dikutip oleh Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto: “*Traditionally, the curriculum has meant the Subject taught in school, or course of study*”.⁴ Senada dengan definisi ini, Carter V. Good menyatakan: “*Curriculum as a systematic group of courses or sequences of subject required for graduation or certification in a major field of study, for example, social studies*

¹ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hal. 183.

² S. Nasution, *Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 9.

³ Rahmat Raharjo, *Pengembangan & Inovasi Kurikulum*, (Yogyakarta: Baituna Publishing, 2012), hlm.16

⁴ Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 12.

curriculum, physical education curriculum...”.⁵Ronald C. Doll mendefinisikan: “*The curriculum of the school is the formal and informal content and process by which learner gain knowledge understanding develop skills and alter attitude appreciations and values under the auspice of that school*”.⁶ Beberapa pengertian kurikulum ini merupakan pengertian yang sempit dan tradisional. Di sini, kurikulum sekedar memuat dan dibatasi pada sejumlah mata pelajaran yang diberikan guru atau sekolah kepada peserta didik guna mendapatkan ijazah atau sertifikat.

Pengertian kurikulum yang sangat luas dikemukakan oleh Hollis L. Caswell dan Doak S. Campbell yang memandang kurikulum bukan sebagai sekelompok mata pelajaran, tetapi kurikulum merupakan semua pengalaman yang diharapkan dimiliki peserta didik di bawah bimbingan para guru “*curriculum not as a group of courses but as all the experiences children have under the guidance of teachers*”.⁷ Sejalan dengan pengertian ini, J. Galen Saylor, William M. Alexander dan Arthur J. Lewis juga mengungkapkan pengertian kurikulum yang dikutip oleh Peter F. Oliva “*We define curriculum as a plan for providing sets of learning opportunities for persons to be educated*”.⁸Demikian pula Harold B. Alpertus memandang kurikulum sebagai *all of the activities that are provided for students by the school*.⁹ Lebih lanjut Alice Miel mengemukakan sebagaimana yang dikutip Nasution bahwa kurikulum juga meliputi keadaan gedung, suasana sekolah, keinginan, keyakinan, pengetahuan dan sikap orang-orang yang melayani dan dilayani sekolah, yakni anak didik, masyarakat, para pendidik dan personalia—termasuk penjaga sekolah, pegawai administrasi, dan orang lainnya yang ada hubungannya dengan murid-murid.¹⁰

Pengertian kurikulum sebagaimana di atas mencakup semua pengalaman yang diharapkan dikuasai peserta didik di bawah bimbingan para guru. Pengalaman ini bisa bersifat intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstra kurikuler, baik pengalaman di dalam maupun di luar kelas. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kurikulum mencakup pengertian yang sangat luas meliputi apayang disebut dengan kurikulum potensial, kurikulum aktual, dan kurikulum tersembunyi atau *hidden curriculum*. Kurikulum tersembunyi adalah hal atau kegiatan yang terjadi di sekolah dan ikut mempengaruhi perkembangan peserta didik, namun tidak diprogramkan dalam kurikulum potensial. Dalam pengertian lain kurikulum tersembunyi adalah hasil;

⁵ Carter V. Good, ed., *Dictionary of Education, Third edition*, (New York: McGraw-Hill, 1973), hlm. 157.

⁶ Ronald C. Doll, *Curriculum Improvement Decision Making And Process*, (Boston: Nallyn Bacon, 1996), hlm. 15.

⁷ Peter F. Oliva, *Developing the Curriculum*, (New York: HarperCollins Publisher, 1992), p. 6

⁸ Peter F. Oliva, *Developing the Curriculum...*, p. 6 lihat juga S. Nasution, *Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 4

⁹ S. Nasution, *Pengembangan Kurikulum...* hlm. 5

¹⁰ S. Nasution, *Pengembangan Kurikulum...* hlm. 6

dari suatu proses pendidikan yang tidak direncanakan. Artinya, perilaku yang muncul dari luar tujuan yang dideskripsikan oleh guru.¹¹

Terdapat tiga hal dalam pembahasan kurikulum dan pengembangannya yaitu *pertama* kurikulum sebagai rencana (*as a plan*) yang menjadi pedoman (*guideline*) dalam mencapai tujuan yang akandicapai. *Kedua*, kurikulum sebagai materi atau isi (*curriculum as a content*) yang akan disampaikan kepada peserta didik, dan *ketiga*, dengan cara apa dan bagaimana kurikulum disampaikan. Ketiga hal tersebut adalah satu kesatuan dan bersinergi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum dapat difahami sebagai sebuah proses penyusunan rencana tentang isi atau materi pelajaran yang harus dipelajari dan bagaimana cara mempelajarinya. Dalam hal ini pengembangan kurikulum adalah sebuah proses yang terus menerus (*continuu*), dinamis (*dynamic*), dan kontekstual (*contextual*).¹²

Kaleidoskop Kebijakan Kurikulum di Indonesia

Kebijakan kurikulum di Indonesia secara sederhana dapat dipetakan menjadi tiga bagian yaitu masa prakemerdekaan, kemerdekaan, dan reformasi. Berikut ini adalah kaleidoskop kebijakan kurikulum di Indonesia dari masa pra kemerdekaan dimana pada masa ini sekolah sudah mulai dikenalkan meski masih sangat terbatas, sampai pada masa reformasi.

1. Kebijakan Kurikulum Pendidikan Masa Pra Kemerdekaan

Kebijakan pendidikan pada masa pra kemerdekaan dipengaruhi oleh kolonialisme, dimana kebijakan dan praktik pendidikan dikelola dan dikendalikan oleh penjajah. Tujuannya adalah mendukung dan memperkuat kepentingan kekuasaan penjajah, dan menjadikan pribumi sebagai abdi penjajah. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai dalam pengembangan usaha melalui kerja paksa, penjajah membutuhkan pegawai rendahan yang dapat membaca dan menulis. Oleh karena itu, penjajah membentuk lembaga-lembaga pendidikan yang hanya diperuntukkan bagi kalangan terbatas, yaitu anak-anak golongan ningrat yang selanjutnya diproyeksikan sebagai pegawai rendahan.

Terdapat dua bentuk kebijakan pendidikan pada masa kolonial ini yaitu. *Pertama*, kebijakan Sekolah Kelas Dua yang diperuntukkan bagi anak pribumi dengan lama pendidikan 3 tahun. Kurikulum yang diajarkan

¹¹ Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran*. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 25

¹² Imam Machali, *Kurikulum Dimensi Kecerdasan Majemuk (Multiple Intellegences) dalam Kurikulum 2013*, *Insania*, 19 (1) Juni 2014: 5

meliputi berhitung, menulis dan membaca. *Kedua*, kebijakan Sekolah Kelas Satu yang diperuntukkan bagi anak pegawai pemerintah Hindia Belanda. Lama pendidikannya 4 tahun, kemudian 5 tahun dan terakhir 7 tahun. Kurikulum yang diajarkan meliputi ilmu bumi, sejarah, dan ilmu hayat.¹³

Pada jenjang pendidikan menengah didirikan *Gymnasium* yang siswanya hanya golongan ningrat. Masa belajar pendidikan ini berlangsung selama 3 tahun. Mata pelajaran yang diajarkan meliputi Bahasa Belanda, Bahasa Inggris, Ilmu Hitung, Aljabar, Ilmu Ukur, Ilmu Alam atau Kimia, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi, Sejarah dan Tata Buku. Kemudian model pendidikan *Gymnasium* berubah menjadi MULO (*Meer Uifgebried Order Wijs*) yang lama pendidikannya 4 tahun.

Sedangkan untuk jenjang atau tingkatan atas, Belanda mendirikan AMS (*Algemene Midelbare School*). Lama pendidikan ini berlangsung selama 3 tahun yang terbagi pada bagian A dan B. Bagian A spesifikasinya adalah ilmu kebudayaan yaitu kesusatraan timur dan kesusatraan klasik barat. Sedangkan bagian B spesifikasi pelajarannya adalah ilmu pengetahuan kealaman yang meliputi ilmu pasti dan ilmu alam.

Ketika kolonialisme beralih dari Belanda ke Jepang, maka kebijakan-kebijakan pendidikan yang dibentuk oleh kolonial Belanda diganti dengan model pendidikan berciri khas Jepang. Kebijakan kolonial Jepang adalah pada pendidikan tingkat rendah, Jepang menggantinya dengan sebutan *Kokumin Gako* dengan lama pendidikan 6 tahun. Kebijakan kurikulum pendidikannya lebih menitik beratkan pada olahraga kemiliteran yang bertujuan untuk membantu pertahanan Jepang.¹⁴

2. Kebijakan Kurikulum Pendidikan Pasca Kemerdekaan

Kebijakan kurikulum pendidikan pada masa pasca kemerdekaan, dibatasi sampa pada masa reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Reformasi membawa dampak yang luar biasa bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Hal ini diawali dengan terbitnya UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 beserta turunan perundang-udangannya. Kebijakan kurikulum pendidikan pasca kemerdekaan dimulai pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, dan 1994.

¹³ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 17.

¹⁴ *Ibid...*, hlm. 18.

a) Kurikulum 1947

Awal terbentuknya kurikulum 1947, namanya adalah Rencana Pembelajaran 1947 atau dikenal dengan sebutan *leer plan*.¹⁵ Yang menjadi ciri utama pada kebijakan kurikulum 1947 ini adalah kurikulum ini lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Pada masa tersebut, siswa lebih diarahkan tentang cara bersosialisasi dengan masyarakat. Aspek afektif dan psikomotorik lebih ditekankan dengan pengadaan pelajaran kesenian dan pendidikan jasmani. Penekanannya adalah menumbuhkan kesadaran bela negara.¹⁶

b) Kurikulum 1952

Kebijakan kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kebijakan kurikulum ini merupakan lanjutan dari hasil kajian Panitia Penyelidik Pengajaran sebelumnya, dan hasil dari Jawatan Pengajaran di Surakarta yang telah menyusun rencana pelajaran terurai pada tahun 1947 namun belum sempat dilaksanakan dan baru dapat dikemukakan lagi sebagai rencana pelajaran terurai pada tahun 1952. Rencana pelajaran terurai ini merupakan respond dan hasil penyesuaian dengan UU Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pelajaran.¹⁷ Ciri yang paling menonjol dari kurikulum 1952 adalah setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Pada masa ini, kebutuhan peserta didik akan ilmu pengetahuan lebih diperhatikan, dan satuan mata pelajaran lebih dirincikan. Namun, peserta didik masih diposisikan sebagai obyek, karena guru menjadi subyek sentral dalam mentransfer ilmu pengetahuan. Guru menentukan apa saja yang akan diperoleh siswa di kelas, dan guru pula yang menentukan standar-standar keberhasilan siswa dalam proses pendidikan.¹⁸

c) Kurikulum 1964

Menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini, kebijakan yang diambil

¹⁵ *Leer plan* adalah istilah dalam bahasa Belanda artinya rencana pembelajaran. Lihat Kunandar, *Implementasi Kurikulum KTSP* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 86.

¹⁶ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum...*, hlm. 32.

¹⁷ H.A.R. Tilaar, *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945 – 1995*, (Jakarta, Grasindo, 1995), hlm. 254

¹⁸ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum...*, hlm. 33.

adalah bernama Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 adalah pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pantja Wardhana (Pancawardhana) yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral.¹⁹Prinsip-prinsip Pantja Wardhana sebagai sistem pendidikan adalah 1) perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional internasional/keagamaan, 2) perkembangan kecerdasan, 3) perkembangan emosional artistic atau rasa keharuan dan keindahan lahir batin, 4) perkembangan *keprigelan* atau kerajinan tangan, dan 5) perkembangan jasmani.²⁰

d) Kurikulum 1968

Kebijakan kurikulum 1968 merubah struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan.

e) Kurikulum 1975

Kebijakan kurikulum 1975 menekankan pada tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Pada kurikulum ini, peran guru menjadi lebih penting, karena setiap guru wajib membuat rincian tujuan yang ingin dicapai selama proses belajar-mengajar berlangsung, setiap guru harus secara detail merencanakan pelaksanaan program belajar mengajar. Dengan kurikulum ini semua proses belajar mengajar menjadi sistematis dan bertahap.²¹

f) Kurikulum 1984

Kebijakan kurikulum 1984 mengusung *process skill approach*. Kurikulum 1984 ini lahir sebagai perbaikan dari kurikulum sebelumnya (kurikulum 1975). Kurikulum 1984 mempunyai ciri-ciri 1) berorientasi pada tujuan pembelajaran (intruksional), 2) pendekatan

¹⁹ Sholeh Hidayat, *Pengembangan Kurikulum Baru*, (Bandung: Rosda, 2013), hlm. 4

²⁰ Lihat, *intruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Nomor 2* (Panca Wardhana/Hari Krida) Tahun 1961. Lihat juga H.A.R. Tilaar, *50 Tahun...* hlm. 256

²¹ Kunandar, *Implementasi Kurikulum...*, hlm. 87

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau *Student Active Learning* (SAL), 3) materi pembelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral, 4) menenamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan, 5) Materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa, 6) menggunakan pendekatan ketrampilan proses (*process skill approach*).²² Karena sifatnya yang senralistik, kurangnya sosialisasi dan minimnya daya dukung implementasi kurikulum maka banyak sekolah yang kurang mampu menterjemahkan, dan menerapkan CBSA, sehingga pada akhirnya banyak penolakan terhadap kurikulum ini.

g) Kurikulum 1994

Kebijakan terhadap kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Pada Kurikulum ini menekankan pada prinsip *Link and Match* pada sekolah kejuruan seperti STM (Sekolah Teknik Menengah). *Link and Match* adalah prinsip tentang pentingnya keterkaitan pendidikan dengan dunia kerja atau industri. Sekolah harus mampu menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang terampil yang dibutuhkan oleh industri. Sebaliknya dunia industri juga harus bersinergi dengan lembaga-lembaga pendidikan. Pada akhirnya kurikulum ini banyak dikritik karena pendidikan menjadi kepanjangan tangan dari proses industrialisasi dan tidak memanusiakan manusia (dehumanisasi).

3. Kebijakan Kurikulum Masa Reformasi

Reformasi membawa dampak besar bagi perkembangan pendidikan nasional. Dengan UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 menjadi babak baru bagi sistem pendidikan nasional. Kebijakan-kebijakan pendidikan pun dikeluarkan sebagai amanat undang-undang. Sampai saat ini, kebijakan terkait dengan kurikulum pendidikan pada masa reformasi dapat dipetakan menjadi tiga bagian yaitu kebijakan kurikulum 2004 berupa Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), kurikulum 2006 yang dikenal dengan Kurikulum

²² holeh Hidayat, *Pengembangan Kurikulum Baru...* hlm. 9-10. Kunandar, *Implementasi Kurikulum...*, hlm. 88.

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dan kurikulum 2013. Berbagai perubahan tersebut merupakan bentuk respon dan perkembangan terhadap berbagai perubahan yang dihadapi baik dalam sistem sosial, politik, budaya, ekonomi, dan Ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara singkat kebijakan dan bentuk perubahan-perubahan kurikulum masa reformasi adalah sebagai berikut:

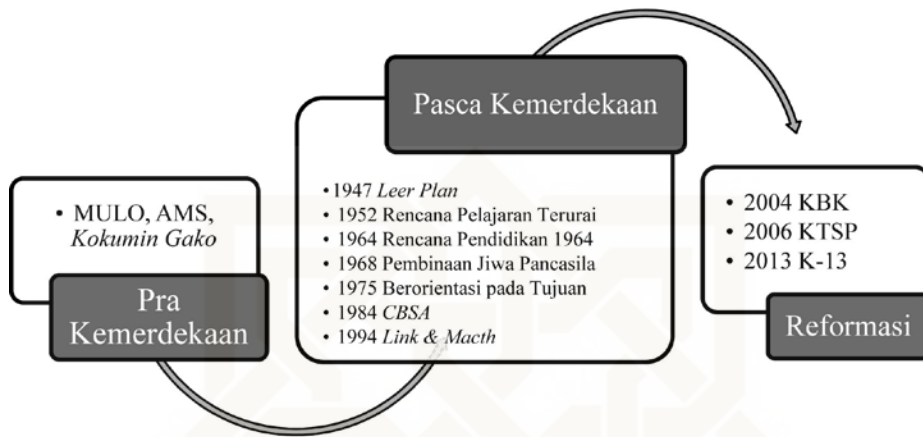
a) Kurikulum 2004 (KBK)

Kebijakan kurikulum 2004 dikenal dengan sebutan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pendidikan berbasis kompetensi menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan (kompetensi) tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar *performance* yang telah ditetapkan. Diantara karakteristik utama KBK yaitu: menekankan pencapaian kompetensi siswa, bukan tuntasnya materi. Kurikulum dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi siswa, Pendekatan dan metode yang digunakan beragam dan bersifat kontekstual.

b) Kurikulum 2006 (KTSP)

Kebijakan kurikulum 2006 ini dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Ciri yang paling menonjol adalah guru diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan Karangka Dasar (KD), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), dan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SKKD) setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Tujuan KTSP meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerahnya.

Dinamika perubahan kebijakan kurikulum di Indonesia secara diangramatik dapat di gambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Dinamika perubahan kebijakan kurikulum di Indonesia Pra Kemerdekaan, Paca Kemerdekaan dan Reformasi

Kebijakan Kurikulum 2013

Kurikulum memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dan strategis. Meskipun bukan satu-satunya faktor utama keberhasilan proses pendidikan, kurikulum menjadi petunjuk dan arah terhadap keberhasilan pendidikan. Kurikulum menjadi penuntun (*guide*) para pelaksana pendidikan—pendidik, tenaga kependidikan—untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuannya dalam mengembangkan dan menjabarkan berbagai materi dan perangkat pembelajaran. Oleh karena itu, pendidik dan tenaga kependidikan yang baik adalah yang mampu memahami kurikulum dan mengimplementasikannya pada proses pembelajaran.

Namun demikian, perubahan, pengembangan, dan perbaikan terus dilakukan seiring dengan tututan dan perubahan zaman dalam berbagai aspek kehidupan—globalisasi. Pergulatan perubahan kurikulum sangat nampak pada tahun 1975, tahun 1984, tahun 1994, yang menuai berbagai dikritik karena dinilai terlalu banyak mata pelajaran dan terlalu padat materi. Padatnya kurikulum berdampak pada padatnya informasi dalam buku teks.

Pada tahun 1975, pembaruan kurikulum didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat itu, sehingga pembaruan tersebut menghasilkan kurikulum 1975 yang sangat sarat beban dan sarat muatan, bahan-bahan yang berat dan sangat berorientasi pada sasaran hasil. Hal ini dipengaruhi oleh paradigma kerangka instruksional, yang sangat mendasarkan diri pada sasaran, instruksi dan evaluasi. Pembaharuan Kurikulum tahun 1984 berusaha

menyederhanakan itu semua. Pembaruan tahun 1994 memadukan teknologi melalui pemecahan masalah, berfikir kritis, dan keterampilan bertanya dalam praktik di kelas.²³

Koreksi, evaluasi dan kritik terhadap kurikulum 1994 terus dilakukan. Kemudian pemerintah melakukan pembaruan dengan diberlakukannya kurikulum 2004 yang diharapkan sebagai kurikulum yang menerapkan kompetensi sebagai tujuan akhir pembelajaran. Kurikulum 2004 kemudian dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (*Competence Based Curriculum*) atau KBK.²⁴ Belum lagi KBK diterapkan secara menyeluruh, muncul kemudian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang merupakan penyempurnaan kurikulum KBK yang dianggap lebih mampu menjawab tantangan yang lebih jelas dan memberikan muatan lokal kepada daerah atau lembaga pendidikan.

Walaupun perubahan dan pembaruan kurikulum terus dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur yang berkompeten, kritik dan berbagai keluhan terus diarahkan terhadap pemerintah—Kemendikbud—sebagai lembaga penanggungjawab bidang pendidikan nasional. KTSP dinilai masih memberatkan pada peserta didik, baik dari substansi maupun metodologinya. Pelajaran yang diterapkan di satuan pendidikan terutama di jenjang pendidikan dasar, terlalu padat dan tumpang tindih. Berdasarkan hasil kajian, penelitian, dan evaluasi menyeluruh kemudian KTSP disempurnakan dalam kurikulum 2013.

Kehadiran kurikulum 2013 diharapkan mampu melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Penekanan pembelajaran diarahkan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan sikap spiritual dan sosial sesuai dengan karakteristik Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti diharapkan akan menumbuhkan budaya keagamaan (*religious culture*) di sekolah.

²³ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Agama Islam, *Pedoman Umum Implementasi Kurikulum 2013*, (Jakarta; Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 1

²⁴ Kompetensi secara bahasa berasal dari kata “competence” yang berarti “kecakapan”, “kemampuan”, “keahlian”. Spencer mendefinisikan kompetensi sebagai *Competency is an underlying characteristic of an individual that is causally related to criterion-referenced effective and/or superior performance in a job or situation*. Tiga kata kunci dalam definisi tersebut yaitu *underlying characteristic, causally related*, dan *criterion-referenced*. *Underlying characteristic means the competency is a fairly deep and enduring part of a person's personality and can predict behavior in a wide variety of situations and job tasks. Causally related means that a competence causes or predicts behavior and performance. Dan criterion-referenced means that competency actually predicts who does something well or poorly, as measured on a specific criterion or standard*. Dalam sebuah kompetensi, menurut spencer setidaknya mempunyai lima karakteristik yaitu motif, traits, konsep diri (*self-concept*), pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*). Lihat Lyle M. Spencer, *Competence at Work: Models for Superior Performance*, (Canada: John Wiley & Son, Inc, 1993), hlm. 9

Hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²⁵ Oleh karenanya Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti penting diajarkan dalam rangka untuk mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah Swt dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis dan produktif, baik personal maupun sosial, sebagaimana tujuan pendidikan nasional tersebut.

Perubahan Kurikulum 2013 merupakan wujud pengembangan dan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya—kurikulum KTSP tahun 2006—yang dalam implementasinya dijumpai beberapa masalah yaitu (1) Konten kurikulum terlalu padat yang ditunjukkan dengan banyaknya matapelajaran dan banyak materi yang keluasan dan tingkat kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak, (2) Belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, (3) Kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan, (4) Beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan—misalnya pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan *soft skills* dan *hard skills*, kewirausahaan—belum terakomodasi di dalam kurikulum, (5) Kurikulum belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global, (6) Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru. (7) Standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi (proses dan hasil) dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala, dan (8) Dengan KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multitafsir.

Titik tekan pengembangan Kurikulum 2013 ini adalah penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran, dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan. Oleh karena itu, implementasi Kurikulum 2013 diyakini sebagai langkah strategis dalam menyiapkan dan menghadapi tantangan globalisasi dan tuntutan masyarakat Indonesia masa depan.

Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Dalam

²⁵ UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3

menghadapi tuntutan perkembangan zaman, diperlukan adanya penyempurnaan pola dan penguatan tata kelola kurikulum serta pendalaman dan perluasan materi. Di samping itu, penguatan proses pembelajaran dan penyesuaian beban belajar perlu pula mendapatkan perhatian agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang akan dihasilkan. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada delapan Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan.²⁶

Tantangan internal lainnya adalah terkait dengan faktor perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Terkait dengan perkembangan penduduk, saat ini jumlah penduduk Indonesia usia produktif—15-64 tahun—lebihbanyak dari usia tidak produktif—anak-anak berusia 0-14 tahun dan orang tua berusia 65 tahun ke atas. Jumlah penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya pada tahun 2020-2035 pada saat angkanya mencapai 70%. Pada tahun 2020-2035 Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia usia produktif akan melimpah.²⁷ SDM yang melimpah ini apabila memiliki kompetensi dan keterampilan akan menjadi modal pembangunan yang luar biasa besarnya. Namun, apabila tidak memiliki kompetensi dan keterampilan tentunya akan menjadi beban pembangunan. Oleh sebab itu, tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana mengupayakan agar SDM usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi SDM yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan agar tidak menjadi beban.

Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta berbagai fenomena yang mengemuka. Tantangan masa depan antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Di era globalisasi juga akan terjadi perubahan-perubahan yang cepat.

Dunia akan semakin transparan, terasa sempit, dan seakan tanpa batas. Hubungan komunikasi, informasi, dan transportasi menjadikan satu sama lain

²⁶ Pada Tahun 2013 Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 inidisempurnakanmenjadi PP nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

²⁷ Proyeksi demografis Badan Pusat Statistik dan Statistik PBB

menjadi dekat sebagai akibat dari revolusi dan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Arus globalisasi juga akan menggeser pola hidup masyarakat dari agraris dan perniagaan tradisional menjadi masyarakat industri dan perdagangan modern seperti dapat terlihat di WTO, ASEAN Community, APEC, dan AFTA. Tantangan masa depan juga terkait dengan pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains serta mutu, investasi, dan transformasi pada dunia pendidikan.

Keikutsertaan Indonesia di dalam studi Internasional²⁸ dan PISA (*Program for International Student Assessment*)²⁹ menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia tidak menggembirakan dalam beberapa kali laporan yang dikeluarkan TIMSS dan PISA yang hanya menduduki peringkat empat besar dari bawah. Penyebab capaian ini antara lain adalah karena banyaknya materi uji yang ditanyakan di TIMSS dan PISA tidak terdapat dalam kurikulum Indonesia.

Kompetensi masa depan yang diperlukan dalam menghadapi arus globalisasi antara lain berkaitan dengan kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga Negara yang bertanggungjawab, kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, dan kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal.

Disamping itu, generasi Indonesia juga harus memiliki minat luas dalam kehidupan, memiliki kesiapan untuk bekerja, memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat/minatnya, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Dilihat dari persepsi masyarakat, pendidikan di Indonesia saat ini dinilai terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif dan beban siswa dianggap terlalu berat. Selain itu pendidikan juga dinilai kurang bermuatan karakter. Penyelenggaraan pendidikan juga perlu memperhatikan perkembangan pengetahuan yang terkait dengan perkembangan neurologi dan psikologi serta perkembangan pedagogi yang terkait dengan *observation-based(discovery)learning* serta *collaborative learning*. Tantangan eksternal lainnya berupa fenomena disharmoni yang mengemuka antara lain terkait

²⁸ Studi-studi Internasional yang diikuti di antaranya adalah TIMSS (*Trends in International Mathematics and Science Study*), dan PIRLS (*Progress in International Reading Literacy Study*). Gabungan antara TIMSS dan PIRLS adalah ujian dalam PISA (*The Programme for International Student Assessment*).

²⁹ PISA (*The Programme for International Student Assessment*) adalah studi yang dikembangkan oleh beberapa negara maju di dunia yang tergabung dalam *the Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang berkedudukan di Paris, Prancis. Fokus utama PISA adalah penilaian matematika, sains, dan literasi membaca pada program pendidikan siswa berusia 15 tahun. Indonesia telah berpartisipasi dalam PISA ini sejak tahun 2001. Lihat OECD, PISA 2012 Results in Focus, What 15-year-olds know and what they can do with what they know, (Paris: OECD, 2014), hlm. 3

dengan masalah perkelahian pelajar, masalah narkoba, korupsi, kecurangan dalam ujian, dan gejolak sosial di masyarakat (*social unrest*).

Urgensi Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013

Penjelasan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pada Bagian konsideran dijelaskan bahwa pentingnya dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan, dan salah satu strategi pembangunan pendidikan nasional ini adalah pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. Pada pasal 35 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur bahwa “Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.” Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 35 dinyatakan bahwa “kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.”³⁰

Selain hal tersebut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga menggariskan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.³¹

Dalam rangka mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran tersebut diperlukan suatu kurikulum yang dijadikan sebagai pedoman bagi para pendidik dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Kurikulum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (19) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Perubahan Kurikulum 2013 merupakan wujud pengembangan dan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya—kurikulum KTSP tahun 2006—yang dalam kajian implementasinya dijumpai beberapa masalah. Kurikulum 2013 menitikberatkan pada penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran, dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan

³⁰ UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 BAB IX, Pasal 35, ayat 2, dan juga lihat pada penjelasan pasal demi pasal.

³¹ UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 BAB I, Pasal 1, ayat 1

apa yang dihasilkan. Atas dasar tersebut, penyempurnaan dan implementasi Kurikulum 2013 diyakini sebagai langkah strategis dalam menyiapkan dan menghadapi tantangan globalisasi dan tuntutan masyarakat Indonesia masa depan. Dalam kerangka inilah kurikulum 2013 memerankan fungsi penyesuaian (*the adjusted or adaptive function*) yaitu kurikulum yang mampu mengarahkan peserta didiknya mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial yang terus berubah. Kurikulum 2013 mengintegrasikan tiga ranah kompetensi yaitu sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dalam implementasinya terangkum dalam KI-1 (sikap spiritual), KI-2 (sikap sosial), KI-3 (pengetahuan), dan KI-4 (ketrampilan).

Elemen Perubahan Kurikulum 2013

Perubahan Kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 menyangkut empat elemen perubahan kurikulum³² yaitu *pertama* Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yaitu Adanya peningkatan dan keseimbangan *soft skills* dan *hards skills* dengan mengasah 3 aspek, yaitu : sikap, pengetahuan, dan keterampilan. *Kedua* Standar Isi (SI), yaitu pada perubahan SI dimana pada KTSP 2006 kompetensi diturunkan dari mata pelajaran, pada kurikulum 2013 mata pelajaran diturunkan dari kompetensi. Sedangkan pendekatannya sama-sama dilakukan melalui pendekatan mata pelajaran. *Ketiga* Standar Proses, yaitu yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi, pada kurikulum 2013 dilengkapi dengan pendekatan *scientificity* yaitu mengamati (*observing*), menanya (*questioning*), mengeksplorasi (*exploring*), mengasosiasi (*associating*), dan mengkomunikasikan (*communicating*). Proses belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas saja, tetapi juga di lingkungan sekolah, alam, dan masyarakat. Posisi guru bukan satu-satunya sumber belajar, dan pembelajaran dimensi sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan guru. *Keempat* Standar Penilaian. Penilaian yang dilakukan adalah berbasis kompetensi yaitu pergeseran dari penilaian melalui tes—mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja—menuju penilaian otentik yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Memperkuat model penilaian PAP (Penilaian Acuan Patokan) yaitu pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya terhadap skor ideal (maksimal). Dan mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat siswa sebagai instrumen utama penilaian.

³² Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Agama Islam, *Pedoman Umum Implementasi Kurikulum 2013*, (Jakarta; Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 11-12

Implikasi Perubahan Kurikulum 2013 Dalam Sistem Pembelajaran

Perubahan kurikulum 2013 membawa implikasi pada sistem pembelajaran yang dilakukan. Implikasi perubahan kurikulum 2013 tersebut meliputi empat hal yaitu model pembelajaran berupa tematik-integratif, pendekatan saintifik, strategi aktif, dan penilaian autentik.

Pertama model pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pengintegrasian tersebut dilakukan dalam dua hal, yaitu integrasi sikap, keterampilan dan pengetahuan dalam proses pembelajaran dan integrasi berbagai konsep dasar yang berkaitan. Tema merajut makna berbagai konsep dasar sehingga peserta didik tidak belajar konsep dasar secara parsial. Dengan demikian pembelajarannya memberikan makna yang utuh kepada peserta didik seperti tercermin pada berbagai tema yang tersedia.³³

Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 untuk kelas I, II, dan III adalah model pembelajaran tematik terpadu. Tema yang dipilih berkenaan dengan alam dan kehidupan manusia. keduanya merupakan pemberi makna yang substansial terhadap mata pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, Seni-Budaya dan Prakarya, serta Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Di sinilah Kompetensi Dasar dari IPA dan IPS yang diorganisasikan ke mata pelajaran lain memiliki peran penting sebagai pengikat dan pengembang Kompetensi Dasar mata pelajaran lainnya. Kemudian pada kelas IV, V, dan VI mata pelajaran mulai terpisah. Hal ini didasarkan pada teori dan pandangan bahwa secara psikologis peserta didik belum mampu berpikir abstrak untuk memahami konten mata pelajaran yang terpisah kecuali kelas IV, V, dan VI.

Ruang lingkup pengembangan pembelajaran tematik meliputi seluruh mata pelajaranyaitu Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, BahasaIndonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya dan Prakarya, serta Pendidikan Jasmani,Olahraga dan Kesehatan yang disajikan secara terpadu dengan tema sebagaipemersatu. Akan tetapi untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, pembelajaran tematik terpadu didesain dalam satu lingkup satu agama saja, dan buka mengintegrasikan berbagai tema berbagai agama.³⁴

³³ Kemendikbud, *Bahan Ajar Pengelolaan Pembelajaran tematik*, (Jakarta: Kemendikbud, 2013), hlm. 3. Lihat juga, Abdul Majid, *Pembelajaran Tematik Terpadu*, (Bandung: Rosda, 2014), hlm. 80

³⁴ Hal ini didasarkan pada keyakinan, pandangan, dan ajaran yang berbeda antar agama-agama. Sehingga tidak memungkinkan mengintegrasikan berbagai agama dalam satu tema. Yang memungkinkan adalah satu agama diintegrasikan (tematik-terpadu) dalam satu mata pelajaran.

Kedua pendekatan saintifik (*scientific approach*). Pembelajaran dengan pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang dilakukan agar peserta didik secara aktif mampu menyusun konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah), merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik simpulan dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang “ditemukan” tersebut.³⁵

Pendekatan saintifik dalam pembelajaran bertujuan mengaktifkan dan menumbuhkan kreatifitas peserta didik. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian Dyers, J.H. et al³⁶ yang menunjukkan bahwa bahwa 2/3 dari kemampuan kreativitas seseorang diperoleh melalui pendidikan, 1/3 sisanya berasal dari genetik. Sebaliknya untuk kemampuan kecerdasan berlaku bahwa 1/3 kemampuan kecerdasan diperoleh dari pendidikan, 2/3 sisanya dari genetik. Artinya kita tidak dapat berbuat banyak untuk meningkatkan kecerdasan seseorang tetapi kita memiliki banyak kesempatan untuk meningkatkan kreativitas seseorang. Selanjutnya dalam penelitiannya Dyers menemukan bahwa pembelajaran berbasis kecerdasan tidak akan memberikan hasil signifikan (hanya peningkatan 50%) dibandingkan yang berbasis kreativitas (sampai 200%). Oleh karena itu, penggunaan pendekatan saintifik dalam pembelajaran diyakini dapat membentuk kreatifitas peserta didik. Proses pembelajaran berbasis pendekatan saintifik tersebut meliputi lima tahap yaitu mengamati (*observing*), menanya (*questioning*), mengumpulkan informasi (*explore*) atau mencoba (*experimenting*), mengasosiasi (*associating*), dan mengkomunikasikan (*communicating*)

Ketiga strategi pembelajaran aktif. Permendikbud nomor 81A Tahun 2013³⁷ memberikan pedoman bahwa strategi pembelajaran kurikulum 2013 diarahkan untuk memfasilitasi pencapaian kompetensi yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum agar setiap individu mampu menjadi pebelajar mandiri sepanjang hayat. Sehingga menumbuhkan kreativitas, kemandirian, kerja sama, solidaritas, kepemimpinan, empati, toleransi dan kecakapan hidup guna membentuk watak serta meningkatkan peradaban dan martabat bangsa. Untuk mencapai kualitas tersebut maka kegiatan pembelajaran perlu menggunakan prinsip yang: (1) berpusat pada peserta didik, (2) mengembangkan kreativitas peserta didik, (3) menciptakan

³⁵ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Agama Islam, *Pedoman Pendekatan Saintifik Pada Pembelajaran PAI*, (Jakarta; Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 7

³⁶ Dyers, J.H. et al. *Innovators DNA: Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators*, Harvard Business Review, 2011. Lihat juga Suryo Widodo, *Variabel-Variabel Tersembunyi Dalam Guru Matematika Kreatif*, Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika FMIPA UNY Yogyakarta, 9 November 2013 (Yogyakarta: FMIPA UNY, 2013), hlm. 587

³⁷ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81A Tahun 2013 Tentang tentang Implemetasi Kurikulum, Lampiran IV, hlm. 3-4

kondisi menyenangkan dan menantang, (4) bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika, dan (5) menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna.

Kurikulum 2013 menganut pandangan dasar bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari guru ke peserta didik. Peserta didik adalah subjek yang memiliki kemampuan untuk secara aktif mencari, mengolah, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. Untuk itu pembelajaran harus berkenaan dengan kesempatan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan dalam proses kognitifnya. Agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, peserta didik perlu didorong untuk bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, dan berupaya keras mewujudkan ide-idenya.

Guru memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan mengembangkan suasana belajar yang memberi kesempatan peserta didik untuk menemukan, menerapkan ide-ide mereka sendiri, menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru mengembangkan kesempatan belajar kepada peserta didik untuk meniti anak tangga yang membawa peserta didik ke pemahaman yang lebih tinggi, yang semula dilakukan dengan bantuan guru tetapi semakin lama semakin mandiri. Bagi peserta didik, pembelajaran harus bergeser dari “diberi tahu” menjadi “aktif mencari tahu”.

Keempat penilaian otentik³⁸. *Otentik* atau *otentik* berarti dapat dipercaya, asli, nyata, valid, atau reliabel. Sedangkan penilaian otentik berarti penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) pembelajaran. Penilaian otentik harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah. Peilaian otentik menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik—kompetensi utuh merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian otentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Penilaian otentik menggunakan berbagai cara dan kriteria secara holistik yaitu kompetensi utuh yang merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Proses penilaian otentik mengungkapkan kinerja siswa yang mencerminkan bagaimana peserta didik belajar, capaian hasil, motivasi, dan sikap yang terkait dengan aktivitas pembelajaran. Penilaian ini memerlukan waktu yang lebih lama ketika mengumpulkan informasi, akan tetapi akan dapat mengungkap kompetensi peserta didik yang sebenarnya, hal ini berbeda dengan penilaian tradisional yang

³⁸ Mengenai standar penilaian pendidikan diatur dalam Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian Pendidikan

dilakukan dalam waktu singkat. Penilaian otentik memiliki cakupan pertanyaan yang luas, dan derajat validitas dan reliabilitas lebih tinggi. Penilaian autentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam pengaturan yang lebih autentik.

Simpulan

Kebijakan kurikulum 2013 dimaksudkan untuk melengkapi dan menyempurnakan berbagai kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Penekanan pembelajaran diarahkan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan sikap spiritual dan sosial sesuai dengan karakteristik Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sebagaimana amanat tujuan pendidikan nasional mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Perubahan kebijakan 2013 menyangkut empat elemen perubahan kurikulum yaitu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi (SI), Standar Proses, dan Standar Penilaian. Sedangkan perubahan kebijakan kurikulum 2013 berdampak pada empat hal yaitu model pembelajaran berupa tematik-integratif, pendekatan saintifik, strategi aktif, dan penilaian autentik. Perubahan kebijakan tersebut dalam rangka menyiapkan generasi masa depan Indonesia yang kreatif, inovatif, produktif, dan afektif yang mampu membawa bangsa Indonesia maju dan berperadaban di masa yang akan datang.

Rujukan

- Azwar, Saifuddin. *Pengantar Psikologi Intelligensi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Agama Islam, *Pedoman Umum Implementasi Kurikulum 2013*, Jakarta; Kementerian Agama RI, 2013
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Agama Islam, *Pedoman Pendekatan Saintifik Pada Pembelajaran PAI*, Jakarta; Kementerian Agama RI, 2013
- Doll, Ronald C. *Curriculum Improvemet Decision Making And Process*, Boston: Nallyn Bacon, 1996
- Dyers, J.H. et al. *Innovators DNA: Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators*, Harvard Business Review, 2011.
- Hidayat, Sholeh. *Pengembangan Kurikulum Baru*, Bandung: Rosda, 2013
- Idi, Abdullah. *Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007
- Intruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Nomor 2 (Pancawardhana/ Hari Krida) Tahun 1961
- Kemendikbud, *Bahan Ajar Pengelolaan Pembelajaran tematik*, Jakarta: Kemendikbud, 2013
- Kunandar, *Implementasi Kurikulum KTSP*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Machali, Imam. *Kurikulum Dimensi Kecerdasan Majemuk (Multiple Intellegences) dalam Kurikulum 2013*, *Insania*, 19 (1) Juni 2014
- Majid, Abdul. *Pembelajaran Tematik Terpadu*, Bandung: Rosda, 2014
- Nasution, S. *Pengembangan Kurikulum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003
- OECD. *Learning for tomorrow's world: First results from PISA 2003*. Paris, France: OECD, 2004
- Oliva, Peter F. *Developing the Curriculum*, New York: HarperCollins Publisher, 1992

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 81A tentang Implementasi Kurikulum, 2013
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- PISA 2012 Results. Volume I, *What Students Know and Can Do: Student Performance in Mathematics, Reading and Science*, summarises the performance of students in PISA 2012.
- PISA 2012 Results. Volume II, *Excellence through Equity: Giving Every Student the Chance to Succeed*, defines and measures equity in education and analyses how equity in education has evolved across countries between 2003 and 2012.
- PISA 2012 Results. Volume III, *Ready to Learn: Students' Engagement, Drive and Self-Beliefs*, explores students' engagement with and at school, their drive and motivation to succeed, and the beliefs they hold about themselves as mathematics learners.
- PISA 2012 Results. Volume IV, *What Makes Schools Successful? Resources, Policies and Practices*, examines how student performance is associated with various characteristics of individual schools and school systems.
- PISA 2012 Results. Volume V, *Creative Problem Solving: Students' Skills in Tackling Real-Life Problems*, presents student performance in the PISA 2012 assessment

of problem solving, which measures students' capacity to respond to non-routine situations.

PISA 2012 Results. Volume VI, *Students and Money: Financial Literacy Skills for the 21st Century*, examines students' performance in financial literacy and their experience with money.

Raharjo, Rahmat. *Pengembangan & Inovasi Kurikulum*, Yogyakarta: Baituna Publishing, 2012

Soetopo, Hendyat. dan Wasty Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*, Jakarta: Bina Aksara, 1986

Spencer, Lyle M. *Competence at Work: Models for Superior Performance*, Canada: John Wiley & Son, Inc, 1993

Supamo, Paul. *Teori Intelligensi Ganda dan Aplikasinya di Sekolah: Cara Menerapkan Teori Multiple Intelegenes Howard Gardner*, Yogyakarta: Kanisius, 2008.

Supamo, Paul. *Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Tilaar, H.A.R. *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945 – 1995*, Jakarta, Grasindo, 1995

Widodo, Suryo, *Variabel-Variabel Tersembunyi Dalam Guru Matematika Kreatif*, Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika FMIPA UNY Yogyakarta, 9 November 2013, Yogyakarta: FMIPA UNY, 2013

Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: Kencana, 2008